

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DAN PERBUATAN
ASUSILA DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

Anissa Safira Hidayat

1210832026



Dosen Pembimbing :

Dr. Aidinil Zetra, MA

Dewi Anggraini, S.IP, M.Si

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2017

ABSTRAK

Anissa Safira Hidayat. 1210832026. Implementasi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi. Pembimbing I Dr. Aidinil Zetra, MA. Pembimbing II Dewi Anggraini S.IP, M.Si . Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan pelacuran, ditemui dua lokalisasi pelacuran di Kota Jambi, yaitu Payosigadung (pucuk) dan Langit Biru. Dikarenakan perlu dibentuknya peraturan daerah untuk mengatasi hal tersebut, maka walikota Jambi dengan persetujuan bersama DPRD Kota Jambi memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Penutupan lokalisasi pelacuran pada tanggal 13 Oktober 2014 merupakan langkah awal yang ditempuh Pemerintah Kota Jambi untuk memberantas pelacuran. Walaupun lokalisasi sudah resmi ditutup dan para PSK serta mucikari diberikan kompensasi untuk modal, ternyata masih ada sejumlah PSK yang menawarkan diri kepada pengunjung di dua lokalisasi tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi serta masalah-masalah yang dihadapi dalam implementasi perda. Teori yang digunakan ialah teori implementasi Merilee S. Grindle. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan public yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan kepentingan kelompok semata-mata untuk memberantas pelacuran di Kota Jambi, pemerintah memiliki target untuk memberantas pelacuran, selain itu letak pengambilan keputusan, strategi aktor yang terlibat, karakteristik penguasa juga sangat tepat serta daya tanggap para implementor yang sangat baik. Namun implementasi belum maksimal karena memiliki beberapa masalah seperti masih adanya kebocoran informasi saat razia, sosialisasi yang kurang, untuk memanfaatkan lokalisasi menjadi *Islamic Center* pemerintah belum memiliki dana, para penegak perda tidak memiliki cukup bukti untuk menaikkan kasus pelacuran ke pengadilan, serta pengelolaan sumber daya finansial yang tidak tepat sasaran.

Kata kunci : Implementasi, Pelacuran, Lokalisasi, Jambi

ABSTRACT

Anissa Safira Hidayat. 1210832026. Implementation of Local Regulation Number 2 in 2014 About Combating Prostitution and Sexual Misconduct in the Jambi City. Supervisor I Dr. Aidinil Zetra, MA. Supervisor II Dewi Anggraini S.IP, M.Si. Department of Political Science. Faculty of Social Science and Political Science.

Phenomenon of prostitution is a form of crime that difficult to be handled, which is affected by economic and environmental background. Concerning about prostitution, there are two brothels in Jambi, Payosigadung and Langit Biru. To handle this situation, local government agreed that there must be a regulation to fix this problem, then Jambi's mayor with the approval from senators (DPRD) decided and established Local Regulation Number 2 in 2014 About Combating Prostitution and Sexual Misconduct. Closing the brothel was the first step that was taken by the mayor to terminate the prostitution. Although both of brothels were closed, some prostitutes and pimps that were given compensation still run their activity in those place. The purpose of this research is to identify the implementation of Local Regulation Number 2 in 2014 About Combating Prostitution and Sexual Misconduct in Jambi and problems along the implementation of this regulation. The theory that writer use is Implementation theory of Merilee S. Grindle. According to Grindle there are two variables that affect the implementation of public policy, which is the content of policy and the context of policy. This research uses qualitative case study method. The result of this research shows that, the implementation of Local Regulation Number 2 in 2014 About Combating Prostitution and Sexual Misconduct runs well, these all are supported by some elements. The government target to terminate all prostitution activities, beside the location of decision, strategy of involved actor, characteristic of mastery and responsiveness of implementers are very good. Nevertheless, the implementation haven't reach the maximum target yet because of some problems such as leak information about the raid schedule, to change brothel become Islamic Center government hasn't enough finance, the authorities haven't enough evidence to bring this case to the court and inappropriate management of financial sources.

keywords : Implementation, Prostitution, Brothel, Jambi